



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul : Masyarakat Kaltim dukung pembangunan IKN
Tanggal : Senin, 24 Januari 2022
Surat Kabar : Republika
Halaman : 3

L

REPUBLICA | SENIN, 24 JANUARI 2022

3

Masyarakat Kaltim Dukung Pembangunan IKN

UU IKN diminta menjamin kepastian pembangunan daerah penyanga.

SAMARINDA — Masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) mendukung pembangunan IKN (Ibu Kota Negara). Masyarakat setempat juga disebut tidak menolak kedatangan penduduk luar terkait IKN baru.

"Masyarakat Kaltim itu sejak diumumkannya 26 Agustus 2019 oleh Bapak Presiden sudah mendukung penuh. Tidak ada masalah apalagi penolakan," kata Gubernur Kaltim Isran Noor, Sabtu (22/1).

Isran menjelaskan, penduduk asli Kaltim dari segi sejarah hanya sedikit, tidak sampai se-tengah dari jumlah seluruh pen-

duduknya. Namun, masyarakat Kaltim menerima saudara-saudara dari Ibu Kota Kaltim hidup berdampingan.

"Yang banyak itu pendatang, terutama dari Pulau Jawa sebanyak 35 persen. Lalu, disusul Sulawesi sekitar 20 persen. Sisanya itu termasuk penduduk aslinya, Dayak, Kutai dan Banjar, tapi mereka sudah hidup bersama," ucapnya.

Dukungan terhadap rencana pembangunan IKN dirasa tidak ada masalah dan, menurutnya, apabila masyarakat Kaltim ingin dilibatkan adalah suatu hal yang wajar. "Kita punya kewajiban untuk salahsua. 'Kalau perlu, disesuaikan kapasitas masing-masing untuk melibatkan apa yang bisa dilakukan ya dilakukan," tuturnya.

Gubernur yakin, masyarakat Kaltim pasti akan menerima penduduk dari luar dengan baik ketika berada di sana. "Saya tidak datang masyarakat setempat selalu merasa kedadangan siapa pun."

"Apalagi, yang datang tidak terlalu banyak, ya paling-paling satu sampai dua juta orang yang akan berada di kawasan IKN," ucapnya.

Isran mengatakan, wacana pemindahan ibu kota sebenarnya bukan hal baru. "Wacana pemindahan IKN ini sudah dilakukan sejak sekitar 50 tahun lalu, sejak negara ini dipimpin oleh Presiden Soekarno," ujar Isran. Ide tersebut belum terwujud di kepemimpinan Joko Widodo.

Sementara itu, Wali Kota Samarinda Andi Harun meminta UU IKN menjamin kepastian pembangunan daerah penyanga agar bisa tumbuh bersama dengan IKN. Beliau mengaku bahwa dia, khusus (Pansus) IKN, datang kemari, kita menyaranakan bahwa UU ini harus menjawab keinginan seluruh warga Kalimantan Timur (Kaltim)," kata Andi.

Itu mengaku, telah menyarankan kepada para pemimpin pusat melalui Pansus IKN agar di tiap-tiap daerah penyanga memiliki keunggulan lokal tersendiri.

"Misalnya, Samarinda sebagai pusat pengembangan energi terbarukan, Balikpapan pusat pengembangan manufaktur, kemudian Kutai Kartanegara kefa-

masian. Sehingga, kita tidak saling berebut pasar, melainkan memperkuat keunggulan lokal masing-masing," paparnya.

Pusat perekonomian

Gubernur punya pandangan Jakarta, Antasari Rasjid Baswedan, menegaskan, setelah tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara, Jakarta akan tetap menjadi pusat perekonomian. "IKN kan sudah jadi undang-undang. Yang jelas, Jakarta akan terus menjadi pusat perekonomian," ucapnya.

Hadir di Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu,

Jakarta disebutnya, akan tetap menjadi pusat dari berbagai hal. "Jakarta akan menjadi pusat kebudayaan, dan akan menjadi simpul dari bangsa Indonesia."

Saat ditanyakan, bagaimana nanti kondisi Jakarta setelah lepas dari status IKN, ia kembali menyatakan, Jakarta akan tetap dibangun. "Pemerintahan pindah ke sana, tetapi Jakarta tetap, dia kita buat bangkit kembali. Jakarta Masalahnya di Jakarta akan terus diikhtiarakan agar bisa diselesaikan," katanya.

Anggota panitia khusus (Pansus) RUU IKN Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suradi Jaya Putra pun mengatakan, sebaiknya Jakarta masih layak menjadi Ibu Kota negara.

"Harusnya yang kita pindah dari Jakarta itu adalah pusat pertumbuhan ekonomi Jakarta ini, kita sebar ke seluruh provinsi yang ada di luar Jakarta supaya semakin berkembang," ucap Suradi.

Menurut dia, pemerataan ekonomi di pulau-pulau lainnya dapat terjadi jika pemerintah juga menyamaratakan pembangunannya di berbagai sektor. Bahkan, akan lebih baik jika pembangunan di daerah daerah lain lebih baik dari yang terjadi di Jawa.

Kendati demikian, Fraksi PKS menghormati pengambilan keputusan terhadap pengesahan UU IKN. Namun, FPKS mendukung jika ada pihak yang ingin mengajukan uji materiel UU IKN ke Mahkamah Konstitusi (MK).

■ antara/navir arsyad akbar

ed: indira rezkisan

Baca juga
di republika.id
Pindai QR Code ini

